



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018



Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II



www.pn-kotaagung.go.id
info.pnhta@gmail.com



Jl. Jendral Suprpto Komplek Pemda Tanggamus
Kab. Tanggamus. Lampung



Tlp. (0722) 22141 - 21224
Fax (0722) 21224

KATA PENGANTAR

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung atas pencapaian *output/suboutput* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome* program/*output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/*outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis(Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2015 - 2019

Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Kota Agung dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Kota Agung, Februari 2019

KETUA PENGADILAN KOTA AGUNG



Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19760621 200012 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Strategis	8
1. Visi Pengadilan Negeri Kota Agung	8
2. Misi Pengadilan Negeri Kota Agung	9
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok	11
B. Perjanjian Kinerja	12
- Rencana Kinerja	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja	21
A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung	21
B. Realisasi Anggaran	51
BAB IV Penutup	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Negeri Kota Agung	
2. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2019	

3. SK Tim penyusunan LKjIP tahun 2018
4. Dokumentasi Penyusunan LKjIP 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi serta dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Dengan adanya surat tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018.

Penyusunan LKjIP intinya adalah melaporkan hasil “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2018 yang diukur dengan membandingkan “Rencana Kinerja” tahun 2018 yang telah ditetapkan secara utuh mengacu pada “Rencana Strategis” Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2015-2019.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Kota Agung, telah disusun dan ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun Anggaran 2018 dengan total pagu anggaran sebesar Rp 3.885.291.000,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Negeri Kota Agung selama tahun 2018. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran,

diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan **Peradilan Umum**, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa “*Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya*”.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 dan sesuai Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Kota Agung berdiri, berfungsi dan terpisah dari Pengadilan induknya yakni Pengadilan Negeri Kalianda sejak Bulan Oktober 2005 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura yang ditandatangani dan ditetapkan oleh DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, Presiden RI di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2005.

1. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan Lembaga Penegak Hukum di wilayah hukum di 2 Kabupaten yaitu: Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu, dalam melaksanakan tugasnya, terlepas dari pengaruh Pemerintah dan eksternal lainnya, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peradilan sesuai Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Fungsi :

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai lembaga peradilan di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu mempunyai 6 (enam) fungsi utama organisasi yaitu:

a. Fungsi Peradilan

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Pengadilan Negeri Wilayah di Provinsi Lampung, merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas membina kepastian dalam penerapan hukum melalui putusan tingkat pertama untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Provinsi Lampung diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- 2) Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili

antarpengadilan negeri di daerah hukumnya (Pasal 33 Undang-undang No. 3 Tahun 2009);

b. Fungsi Pembinaan

Pengadilan Tinggi memberikan pengarahan yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

c. Fungsi Pengawasan

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung melakukan pengawasan tentang pelaksanaan tugas teknis Keperkaraan (Yudisial) dan administrasi (Non Yudisial).
- 2) Pengadilan Negeri Kota Agung juga melakukan pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

d. Fungsi Nasihat.

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung dapat memberi nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Instansi Lainnya.
- 2) Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan dibawahnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang No: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Pasal 38 Undang-undang No. 3 Tahun 2009).

e. Fungsi Administratif

- 1) Pengadilan Negeri Kota Agung menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 2) Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Kota Agung

(Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

f. Fungsi Lain-lain.

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta Pasal 39 Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

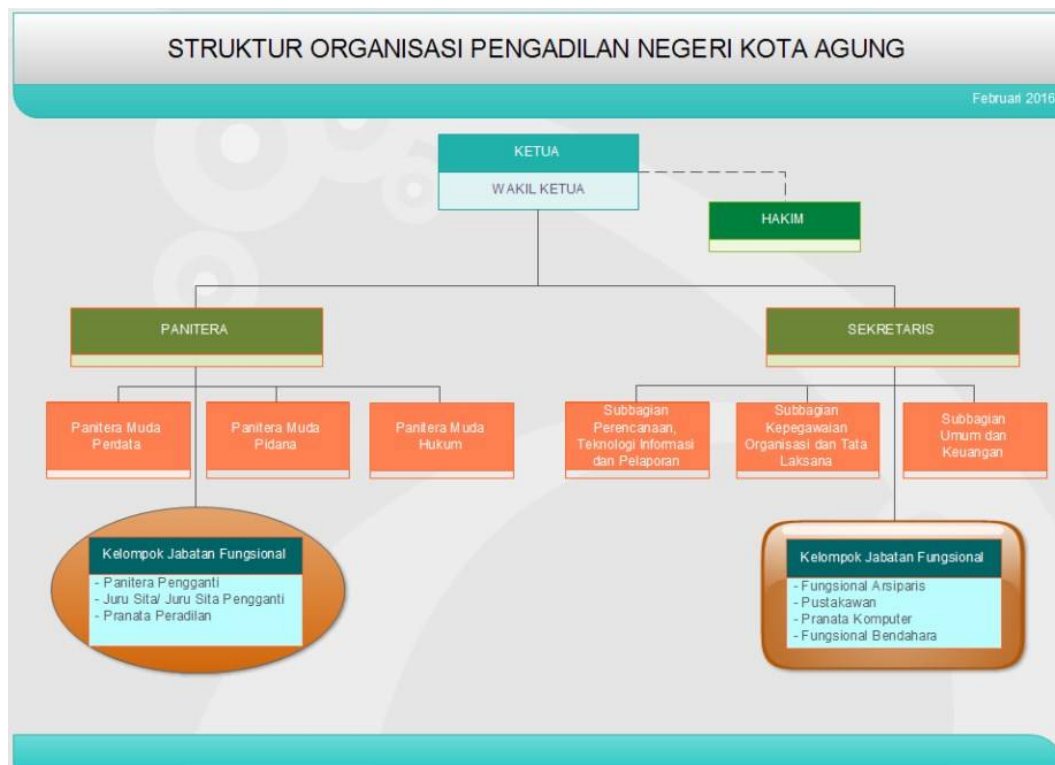
C. STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Organisasi pada Pengadilan Negeri Kota Agung Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda, terdiri dari:
 - a. Panitera Muda Hukum
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Perdata
7. Kepala Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
8. Kelompok Fungsional Kepaniteraan, terdiri dari:
 - a. Panitera Pengganti
 - b. Jurusita
 - c. Jurusita Pengganti
9. Pelaksana (Staf)

Struktur organisasi secara rinci tergambar pada gambar di bawah ini:

Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Agung



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mendeskripsikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung dalam tahun anggaran 2018, dengan bentuk sajian seperti berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF, menguraikan rangkuman atau penjelasan singkat mengenai isi dari LKjIP Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018.

BAB I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Kota Agung dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain: a. Latar Belakang; b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; c. Struktur Organisasi; dan d. Sistematika Penyajian.

BAB II. Perencanaan Kinerja, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Negeri Kota Agung dalam tahun anggaran 2018 yang berisikan antara lain: a. Rencana Strategis; yang mendeskripsikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Program Utama dan Kegiatan Pokok; b. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2018.

BAB III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung yang terdiri dari: a. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung dan; b. Realisasi Anggaran.

BAB IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung di masa yang akan datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan; b. Saran.

Lampiran, yang berisi antara lain: 1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Tahun 2019, 3. SK Tim Penyusunan LKjIP tahun 2018, 4. Dokumentasi Penyusunan LKjIP tahun 2018.

A. RENCANA STRATEGIS

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai lembaga Peradilan Umum yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam wilayah hukum Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu dapat menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah wilayah hukumnya. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2015-2019 yang menjadi *frame* atau *visionable* dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kota Agung 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

1. Visi Pengadilan Negeri Kota Agung

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung. Visi Pengadilan Negeri Kota Agung mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG YANG AGUNG”.

2. Misi Pengadilan Negeri Kota Agung

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Kota Agung, adalah:

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat , dan biaya ringan;
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai wujud dalam mengimplementasikan pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan, maka perlu diuraikan dalam bentuk tujuan strategis sebagaimana termuat di dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
2. Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel.
3. Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah mampu dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan adalah berdasarkan dari visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Agung.

Adapun isu strategis lembaga peradilan yang nampak di muka publik adalah penuntasan tunggakan perkara yang menjadi kewenangan lembaga peradilan secara umum dan Pengadilan Negeri Kota Agung secara khusus,

sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Dalam rangka untuk mencapai tujuan strategis, Pengadilan Negeri Kota Agung berupaya:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung agar lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kinerja dan transparansi Pengadilan Negeri Kota Agung;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Kota Agung.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan dan merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Kota Agung, adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan 2. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 3. Prosentase penurunan sisa Perkara 4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 5. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Kota Agung dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

B. PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG TAHUN 2018

- **Indikator Kinerja Utama Tahun 2018**

Pengadilan Negeri Kota Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan telah dilakukan revidi terakhir pada tahun 2017 yaitu:

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kota Agung

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara: sisa perkaratahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none">perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalanditambah sisa perkara tahun sebelumnyaPenyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100 \%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang Diterima tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Tipikor yang di Upload dalam Website}}{\text{Jumlah Perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<u>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti</u> Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Catatan : BHT: Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	--	--	----------	-------------------------------------

- **Rencana Kinerja Tahun 2018**

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Kota Agung memuat target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	87% 87%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	4.7% 29%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Perdata - Pidana	93% 100%
		- Kasasi - Perdata - Pidana	95% 100%
		- PK - Perdata - Pidana	100% 100%

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	4.70%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	14%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Jumlah anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi (01) dan Badan Peradilan Umum (03) tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 3.905.906.000 (tiga miliar sembilan ratus lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah), dengan rincian program yang akan dilaksanakan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.402.220.000,-
2.	Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 375.400.000,-
3.	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Rp. 128.286.000,-
Jumlah		Rp. 3.905.906.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahunan 2018, 4 (empat) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2018 sebagai berikut:

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100.00% 100.00%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	87% 87%	87.04% 88.76%	100.04% 102.02%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	4.7% 29%	22.22% -290%	472.81% 0%

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Perdata - Pidana - Kasasi - Perdata - Pidana - PK - Perdata - Pidana	93% 100% 95% 100% 100% 100%	91.49% 99.35% 95.74% 99.68% 100.00% 100.00%	98.38% 99.35% 100.78% 99.68% 100% 100%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	4.70%	3.13%	66.49%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	92.63%	102.92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100.00%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	14%	8.33%	59.52%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100.00%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100.00%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100.00%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100.00%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100.00%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2018 secara umum Pengadilan Negeri Kota Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari *pencapaian* sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2018. Namun demikian disisi lain di point persentase penurunan sisa perkara terdapat kenaikan yang sangat besar ini disebabkan **perkara masuk di akhir tahun (bulan Desember 2018) tinggi** yaitu 30 perkara. Pengadilan telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2018, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam tabel di atas. Adapun jumlah perkara yang ditangani dalam tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam tabel rekapitulasi perkara di bawah ini:

Tabel Rekapitulasi Perkara Tahun 2018

Tahun 2018											
N o	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Ban ding	Kas asi	PK	Ekse kusi	Grasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Gugatan	9	16	22	137.50%	3	4	2	0	1	0
2	Permohonan	0	27	25	92.59%	2	0	0	0	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	2	0	0.00%	2	0	0	0	0	0
9	Pidana Biasa	10	296	269	90.88%	37	2	1	0	0	0
10	Pidana Singkat	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Cepat	0	7	7	100.00%	0	0	0	0	0	0

12	Perkara Lalu-Lintas	0	8067	8067	100.00%	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Anak	0	32	30	93.75%	2	0	0	0	0	0
14	Pidana Praperadilan	0	2	2	100.00%	0	0	0	0	0	0
Total Pidana (Tanpa Pidana Lalu-lintas)		10	337	308	91.39%	39	2	1	0	0	0
Total Perdata		9	45	47	104.44%	5	4	2	0	1	0

Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana Biasa Tahun 2018

Pidana Biasa											
N o	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Ban ding	Kas asi	PK	Ekse kusi	Grasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	10	21	8	38.10%	23	0	0	0	0	0
2	Pebruari	23	22	22	100.00%	23	0	1	0	0	0
3	Maret	23	16	25	156.25%	14	0	0	0	0	0
4	April	14	14	10	71.43%	18	0	0	0	0	0
5	Mei	18	46	25	54.35%	39	0	0	0	0	0
6	Juni	39	0	11	0.00%	28	0	0	0	0	0
7	Juli	28	23	32	139.13%	19	0	0	0	0	0
8	Agustus	19	25	23	92.00%	21	2	0	0	0	0
9	September	21	35	10	28.57%	46	0	0	0	0	0
10	Oktober	46	39	28	71.79%	57	0	0	0	0	0
11	November	57	25	40	160.00%	42	0	0	0	0	0
12	Desember	42	30	35	116.67%	37	0	0	0	0	0
Jumlah			296	269	90.88%	367	2	1	0	0	0

Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana Anak Tahun 2018

Pidana Anak											
N o	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Ban ding	Kas asi	PK	Ekse kusi	Grasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	0	1	0	0.00%	1	0	0	0	0	0
2	Pebruari	1	2	2	100.00%	1	0	0	0	0	0
3	Maret	1	6	4	66.67%	3	0	0	0	0	0
4	April	3	2	3	150.00%	2	0	0	0	0	0
5	Mei	2	5	4	80.00%	3	0	0	0	0	0
6	Juni	3	0	3	0.00%	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	3	1	33.33%	2	0	0	0	0	0

8	Agustus	2	6	7	116.67%	1	0	0	0	0	0
9	September	1	1	2	200.00%	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	1	0	0.00%	1	0	0	0	0	0
11	November	1	3	1	33.33%	3	0	0	0	0	0
12	Desember	3	2	3	150.00%	2	0	0	0	0	0
Jumlah			32	30	93.75%	19	0	0	0	0	0

Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana Singkat Tahun 2018

Pidana Singkat											
N o	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Ban ding	Kas asi	PK	Ekse kusi	Grasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
2	Pebruari	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
Jumlah			0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana Cepat Tahun 2018

Pidana Cepat											
N o	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Ban ding	Kas asi	PK	Ekse kusi	Grasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
2	Pebruari	0	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
4	April	0	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0

8	Agustus	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
9	September	0	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0
11	November	0	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
Jumlah			7	7	100.00%	0	0	0	0	0	0

Tabel Rekapitulasi Perkara Perkara Lalu-lintas Tahun 2018

Perkara Lalu-Lintas											
N o	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Ban ding	Kas asi	PK	Ekse kusi	Grasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	0	924	675	73.05%	249	0	0	0	0	0
2	Pebruari	249	482	731	151.66%	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	305	305	100.00%	0	0	0	0	0	0
4	April	0	411	411	100.00%	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	1328	1328	100.00%	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	311	311	100.00%	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	427	427	100.00%	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	680	680	100.00%	0	0	0	0	0	0
9	September	0	660	660	100.00%	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	509	509	100.00%	0	0	0	0	0	0
11	November	0	2030	2030	100.00%	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
Jumlah			8067	8067	100.00%	249	0	0	0	0	0

Tabel Rekapitulasi Perkara Perdata Gugatan Tahun 2018

Perdata Gugatan											
N o	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Ban ding	Kas asi	PK	Ekse kusi	Grasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	9	0	1	0.00%	8	1	0	0	0	0
2	Pebruari	8	2	2	100.00%	8	1	1	0	0	0
3	Maret	8	2	4	200.00%	6	1	0	0	0	0
4	April	6	1	0	0.00%	7	0	0	0	0	0
5	Mei	7	3	4	133.33%	6	0	0	0	0	0
6	Juni	6	1	0	0.00%	7	1	0	0	0	0
7	Juli	7	0	2	0.00%	5	0	0	0	0	0

8	Agustus	5	0	3	0.00%	2	0	1	0	0	0
9	September	2	5	1	20.00%	6	0	0	0	0	0
10	Oktober	6	1	3	300.00%	4	0	0	0	1	0
11	November	4	1	1	100.00%	4	0	0	0	0	0
12	Desember	4	0	1	0.00%	3	0	0	0	0	0
Jumlah			16	22	137.50%	66	4	2	0	1	0

Tabel Rekapitulasi Perkara Perdata Permohonan Tahun 2018

Perdata Permohonan											
N o	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Ban ding	Kas asi	PK	Ekse kusi	Grasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	0	4	4	100.00%	0	0	0	0	0	0
2	Pebruari	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	5	2	40.00%	3	0	0	0	0	0
4	April	3	1	4	400.00%	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	1	0	0.00%	1	0	0	0	0	0
7	Juli	1	5	5	100.00%	1	0	0	0	0	0
8	Agustus	1	3	4	133.33%	0	0	0	0	0	0
9	September	0	3	3	100.00%	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0
11	November	0	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	3	1	33.33%	2	0	0	0	0	0
Jumlah			27	25	92.59%	7	0	0	0	0	0

Tabel Rekapitulasi Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2018

Perdata Gugatan Sederhana											
N o	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Ban ding	Kas asi	PK	Ekse kusi	Grasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
2	Pebruari	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

10	Oktober	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	2	0	0.00%	2	0	0	0	0	0
Jumlah			2	0	0.00%	2	0	0	0	0	0

Pada akhir tahun 2018 Pengadilan Negeri Kota Agung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ini diukur berdasarkan 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100.00% 100.00%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	87% 87%	87.04% 88.76%	100.04% 102.02%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	4.7% 29%	22.22% -290%	472.81% 0%

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		- Banding			
		- Perdata	93%	91.49%	98.38%
		- Pidana	100%	99.35%	99.35%
		- Kasasi			
		- Perdata	95%	95.74%	100.78%
		- Pidana	100%	99.68%	99.68%
		- PK			
		- Perdata	100%	100.00%	100%
		- Pidana	100%	100.00%	100%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	4.70%	3.13%	66.49%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	92.63%	102.92%

Analisis keenam indikator kinerja sasaran strategis pertama ini sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
- Perdata	100%	100.00%	100%
- Pidana	100%	100.00%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan :

Sisa perkara: sisa perkaratahun sebelumnya

- Target Persentase sisa perkara **perdata** yang diselesaikan tahun 2018 adalah **100%**, sisa perkara **perdata** tahun 2017 adalah **9** perkara terdiri dari **9** perkara perdata gugatan, sisa perkara **perdata** tahun 2017 yang diselesaikan di tahun 2018 ada **9** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\% = \frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- Target Persentase sisa perkara **pidana** yang diselesaikan tahun 2018 adalah **100%**, sisa perkara tahun **pidana** 2017 adalah **10** perkara terdiri dari **10** perkara pidana biasa, sisa perkara **pidana** tahun 2017 yang diselesaikan di tahun 2018 ada **10** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\% = \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

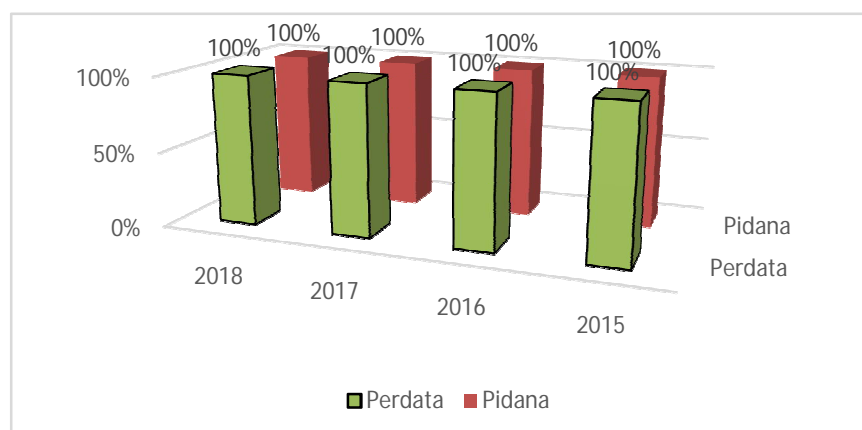
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Perkara	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
2017	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
2016	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
2015	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya	Diselesaikan Tahun Berjalan
2018	- Perdata	9	9
	- Pidana	10	10
2017	- Perdata	15	15
	- Pidana	37	37
2016	- Perdata	66	66
	- Pidana	44	44
2015	- Perdata	6	6
	- Pidana	37	37

Grafik Perbandingan Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi kinerja dan capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018 baik pidana maupun perdata jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dikatakan meningkat hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi dan capaian baik tahun 2018 maupun tahun sebelumnya adalah 100% yang merupakan persentase tertinggi dari realisasi dan capaian.

Perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - perdata - pidana	100% 100%

Realisasi kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018 baik pidana maupun perdata jika dibandingkan dengan target jangka menengah sama yaitu 100%, ini berarti target jangka menengah pada tahun 2018 sudah tercapai.

- Analisa keberhasilan realisasi dan capaian kinerja persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan tahun 2018 dikarenakan perkara perdata yang masuk dapat diselesaikan di bawah satu tahun.
- Analisa keberhasilan realisasi dan capaian kinerja persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tahun 2018 dikarenakan persidangan perkara pidana dilaksanakan dengan tepat waktu.

Penggunaan sumber daya manusia yang ada dalam hal ini Hakim dan Panitera Pengganti sudah sangat tepat hal ini dapat dilihat dari

keberhasilan capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018 baik perkara pidana maupun perdata.

Program/kegiatan penunjang yang ada sudah dapat menunjang keberhasilan capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018 baik perkara pidana maupun perdata.

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	87%	87.04%	100.04%
- Pidana	87%	88.76%	102.02%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$$

Catatan :

- perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

- Target persentase perkara **perdata** yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 adalah **87%**, jumlah perkara **perdata** yang ada tahun 2018 adalah **54** perkara terdiri dari **9** perkara sisa tahun 2017 dan **45** perkara yang masuk tahun 2018, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2018 ada **47** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\% = \frac{47}{54} \times 100\% = 87.04\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{87.04\%}{87\%} \times 100\% = 100.04\%$$

- Target persentase perkara **pidana** yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 adalah **87%**, jumlah perkara **pidana** yang ada tahun 2018 adalah **347** perkara terdiri dari **10** perkara sisa tahun 2017 dan **337** perkara yang masuk tahun 2018, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2018 ada **308** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\% = \frac{308}{347} \times 100\% = 88.76\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{88.76\%}{87\%} \times 100\% = 102.02\%$$

Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

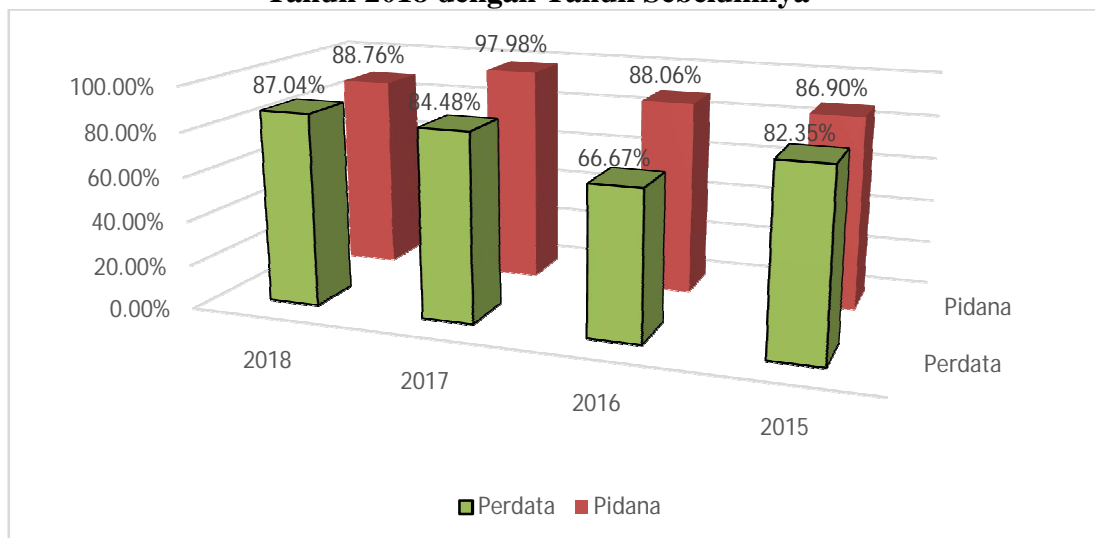
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Perkara	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	- Perdata	87%	87.04%	100.04%
	- Pidana	87%	88.76%	102.02%
2017	- Perdata	84%	84.48%	100.57%
	- Pidana	84%	97.98%	116.65%
2016	- Perdata	81%	66.67%	82.03%
	- Pidana	81%	88.06%	108.72%
2015	- Perdata	79%	82.35%	104.24%
	- Pidana	79%	86.90%	110.01%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk Tahun Berjalan	Yang Diselesaikan Tahun Berjalan
2018	- Perdata	9	45	47
	- Pidana	10	337	308
2017	- Perdata	15	43	49
	- Pidana	37	459	486
2016	- Perdata	6	39	30
	- Pidana	44	266	273
2015	- Perdata	6	28	28
	- Pidana	37	299	292

Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



- Realisasi kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 meningkat.
- Realisasi kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 menurun.
- Capaian kinerja persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 berhasil (perdata 100.04%, pidana 102.02%).

Perbandingan **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** tahun 2018 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Persentase sisa perkara yang diselesaikan - perdata - pidana	90% 90%

Realisasi kinerja **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** tahun 2018 baik perdata maupun pidana jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan belum tercapai (perdata 87.04%, pidana 88.76%).

- Analisa **peningkatan** realisasi kinerja **persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu** tahun 2018 dikarenakan sisa perkara **perdata** tahun lalu (2017) relatif lebih sedikit dibandingkan sisa perkara **perdata** tahun 2016.
- Analisa **penurunan** realisasi kinerja **persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu** tahun 2018 dikarenakan sisa perkara **pidana** tahun lalu (2017) relatif lebih banyak dibandingkan sisa perkara **pidana** tahun 2016.
- Analisa **keberhasilan** capaian kinerja **persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu** tahun 2018 dikarenakan tingkat disiplin dalam melaksanakan persidangan meningkat.

Penggunaan sumber daya manusia yang ada dalam hal ini Hakim dan Panitera Pengganti sudah sangat tepat hal ini dapat dilihat dari

keberhasilan capaian kinerja **persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu** baik perkara pidana maupun perdata.

Program/kegiatan penunjang yang ada sudah dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja **persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu** baik perkara pidana maupun perdata.

c. **Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara;**

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	4.7%	22.22%	472.81%
- Pidana	29%	-290.00%	0%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

$$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100 \%$$

T_n = Sisa perkara tahun berjalan
T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

- Target persentase penurunan sisa perkara **perdata** tahun 2018 adalah **4.7%**, jumlah sisa perkara **perdata** tahun 2017 adalah **9** perkara, sisa perkara **perdata** tahun 2018 adalah **7** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{Tn.1 - Tnx}{Tn.1} \times 100\% = \frac{9-7}{9} \times 100\% = \frac{2}{9} \times 100\% = 22.22\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{22.22\%}{4.5\%} \times 100\% = 472.81\%$$

- Target persentase penurunan sisa perkara **pidanatahun** 2018 adalah **29%**, jumlah sisa perkara **pidanatahun** 2017 adalah **10** perkara, sisa perkara **perdata** tahun 2018 adalah **39** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{Tn.1 - Tnx}{Tn.1} \times 100\% = \frac{10-39}{10} \times 100\% = \frac{-29}{10} \times 100\% = -290\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{-290\%}{29\%} \times 100\% = -1000\% \Rightarrow 0\%$$

Perbandingan persentase penurunan sisa perkara tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

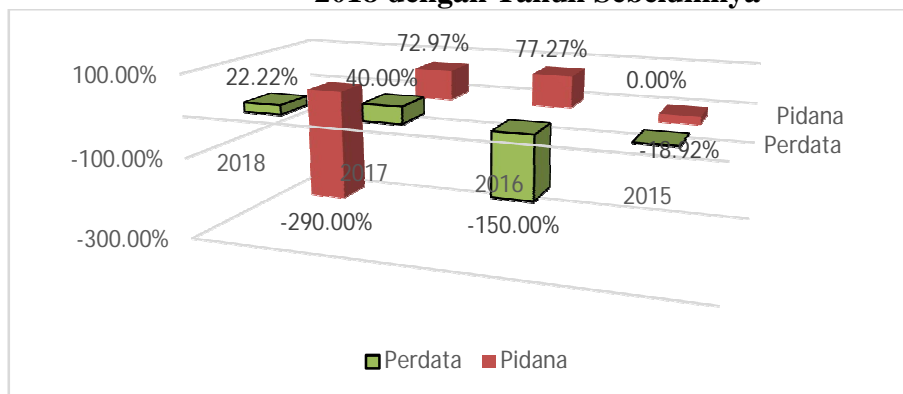
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Perkara	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	- Perdata	4.70%	22.22%	472.81%
	- Pidana	29.00%	-290.00%	0%
2017	- Perdata	4.40%	40.00%	909.09%
	- Pidana	28.00%	72.97%	260.62%
2016	- Perdata	4.10%	-150.00%	0%
	- Pidana	27.00%	77.27%	286.20%
2015	- Perdata	3.80%	0%	0%
	- Pidana	26.00%	-18.92%	0%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara	Sisa Tahun Sebelumnya	Sisa Tahun Berjalan
2018	- Perdata	9	7
	- Pidana	10	39
2017	- Perdata	15	9
	- Pidana	37	10
2016	- Perdata	6	15
	- Pidana	44	37
2015	- Perdata	6	6
	- Pidana	37	44

Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



- Realisasi dan capaian kinerja persentase penurunan sisa perkara **perdata dan pidana** tahun 2018 **menurun**.

Perbandingan **persentase penurunan sisa perkara** tahun 2018 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c. Persentase penurunan sisa perkara. - Perdata - Pidana	5% 30%

Realisasi kinerja **persentase penurunan sisa perkara** tahun 2018 baik perdata maupun pidana jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan belum tercapai (perdata 22.22%, pidana-290.00%).

- Analisa **menurunnya** realisasi dan capaian kinerja **persentase penurunan sisa perkara perdata maupun pidana** tahun 2018 dikarenakan sisa perkara **perdata maupun pidanatahun** 2018 terutama di akhir tahun banyak yang belum putus.

Penggunaan sumber daya manusia yang ada dalam hal ini Hakim dan Panitera Pengganti maupun program/kegiatan penunjang sudah sangat tepat,penurunan capaian kinerja **persentase penurunan sisa perkara tahun 2018** baik perkara pidana maupun perdata semata-mata perkara masuk diakhir tahun yang belum bisa putus namun sudah berjelang sesuai dengan court calendar yang ditetapkan.

d. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Banding, Kasasi dan PK;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Banding, Kasasi dan PK Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
- Banding			
- Perdata	93%	91.49%	98.38%
- Pidana	100%	99.35%	99.35%
- Kasasi			
- Perdata	95%	95.74%	100.78%
- Pidana	100%	99.68%	99.68%
- PK			
- Perdata	100%	100.00%	100%
- Pidana	100%	100.00%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya banding, kasasi dan PK tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Catatan :

- Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

- Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya banding, kasasi dan PK perkara **perdata** tahun 2018 adalah **banding 93%, kasasi 95%, PK 100%**, jumlah perkara **banding perdata** tahun 2018 adalah **4**, perkara **kasasi perdata** tahun 2018 adalah **2** perkara, perkara **PK perdata** tahun 2018 adalah **0** perkara, sedangkan jumlah putusan perkara **perdata** tahun 2018 adalah **47** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

Realisasi :

- Banding: $\frac{\text{Jml Perkara yang Tdk Mengajukan Banding}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\% = \frac{43}{47} \times 100\% = 91.49\%$
- Kasasi : $\frac{\text{Jml Perkara yang Tdk Mengajukan Kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\% = \frac{45}{47} \times 100\% = 95.74\%$
- PK : $\frac{\text{Jml Perkara yang Tdk Mengajukan PK}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\% = \frac{47}{47} \times 100\% = 100\%$

Capaian

- Banding: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{91.49\%}{93.00\%} \times 100\% = 98.38\%$
- Kasasi: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{95.74\%}{95.00\%} \times 100\% = 100.78\%$
- PK: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100.00\%}{100.00\%} \times 100\% = 100.00\%$

- Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya banding, kasasi dan PK perkara pidana tahun 2018 adalah **banding 100%, kasasi 100%, PK 100%**, jumlah perkara **banding perdata** tahun 2018 adalah **2**, perkara **kasasi perdata** tahun 2018 adalah **1** perkara, perkara **PK perdata** tahun 2018 adalah **0** perkara, sedangkan jumlah putusan perkara **perdata** tahun 2018 adalah **308** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

Realisasi :

- **Banding:** $\frac{\text{Jml Perkara yang Tdk Mengajukan Banding}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\% = \frac{306}{308} \times 100\% = 99.35\%$
- **Kasasi :** $\frac{\text{Jml Perkara yang Tdk Mengajukan Kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\% = \frac{307}{308} \times 100\% = 99.68\%$
- **PK :** $\frac{\text{Jml Perkara yang Tdk Mengajukan PK}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\% = \frac{308}{308} \times 100\% = 100\%$

Capaian

- **Banding:** $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{99.35\%}{100.00\%} \times 100\% = 99.35\%$
- **Kasasi:** $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{99.68\%}{100.00\%} \times 100\% = 99.68\%$
- **PK:** $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100.00\%}{100.00\%} \times 100\% = 100.00\%$

Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

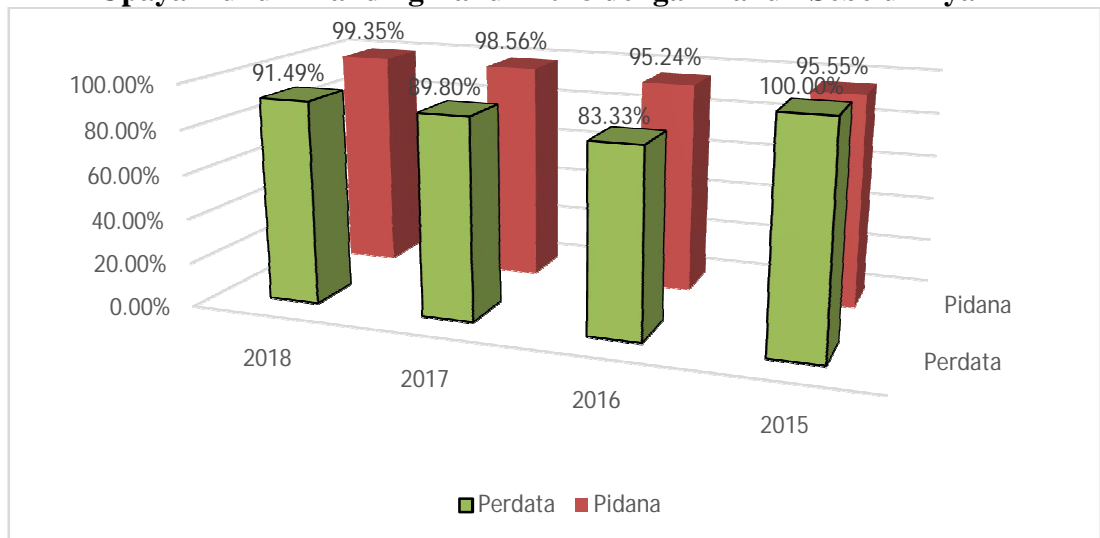
Tahun	Perkara	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	Banding			
	- Perdata	93%	91.49%	98.38%
	- Pidana	100%	99.35%	99.35%
	Kasasi			
	- Perdata	95%	95.74%	100.78%

	- Pidana PK - Perdata - Pidana	100% 100% 100%	99.68% 100% 100%	99.68% 100% 100%
2017	Banding - Perdata - Pidana Kasasi - Perdata - Pidana PK - Perdata - Pidana	91% 100% 92% 100% 100% 100%	89.80% 98.56% 100.00% 98.97% 100% 100%	98.68% 98.56% 108.70% 98.97% 100% 100%
2016	Banding - Perdata - Pidana Kasasi - Perdata - Pidana PK - Perdata - Pidana	89% 100% 89% 100% 100% 100%	83.33% 95.24% 93.33% 97.44% 100% 100%	93.63% 95.24% 104.87% 97.44% 100% 100%
2015	Banding - Perdata - Pidana Kasasi - Perdata - Pidana PK - Perdata - Pidana	87% 100% 86% 100% 100% 100%	100.00% 95.55% 100.00% 97.60% 100% 100%	114.94% 95.55% 116.28% 97.60% 100% 100%

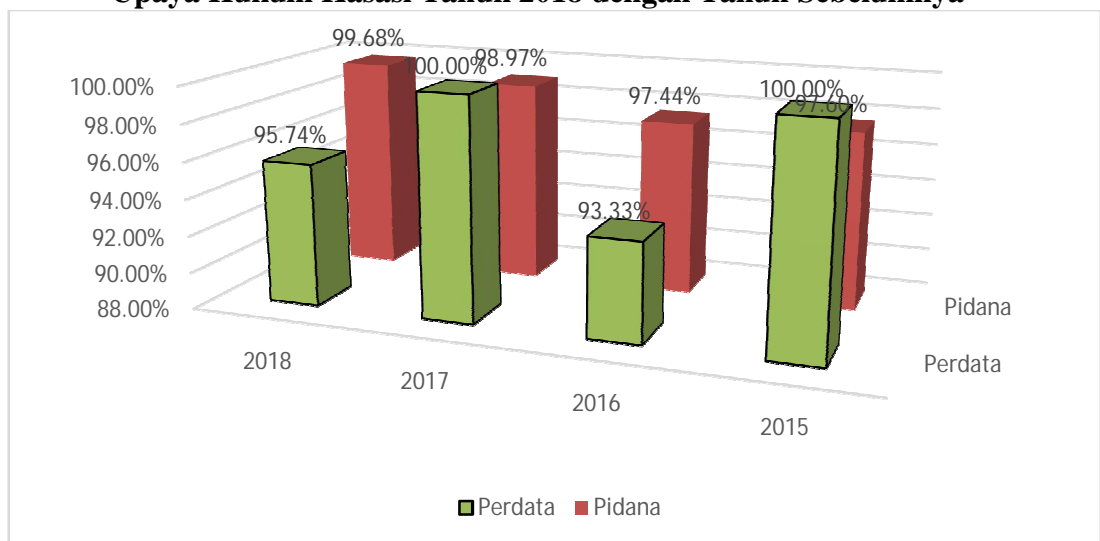
Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara	Banding	Kasasi	PK	Perkara Putus
2018	- Perdata - Pidana	4 2	2 1	0 0	47 308
2017	- Perdata - Pidana	5 7	0 5	0 0	49 486
2016	- Perdata - Pidana	3 13	2 7	0 0	30 273
2015	- Perdata - Pidana	0 13	0 7	0 0	28 292

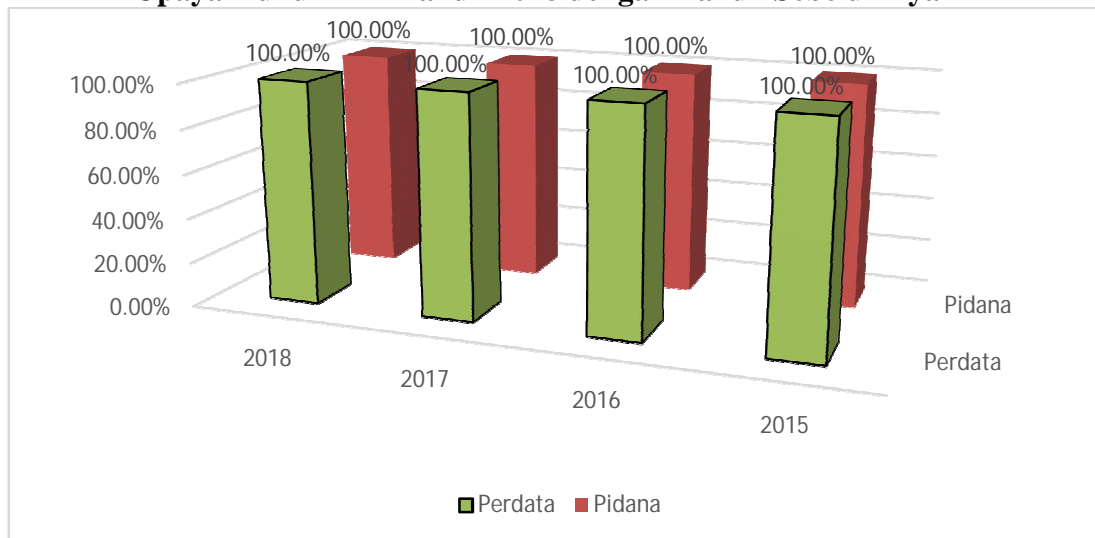
Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



- Realisasi kinerja persentase perkara **perdata** yang tidak mengajukan upaya hukum **banding** tahun 2018 **meningkat** (tahun 2017 **89.80%**, tahun 2018 **91.49%**). Capaian kinerja persentase perkara **perdata** yang tidak mengajukan upaya hukum **banding** tahun 2018 **menurun** (tahun 2017 **98.68%**, tahun 2018 **98.38%**).
- Realisasi kinerja persentase perkara **pidana** yang tidak mengajukan upaya hukum **banding** tahun 2018 **meningkat** (tahun 2017 **98.56%**, tahun 2018 **99.35%**). Capaian kinerja persentase perkara **pidana** yang tidak mengajukan upaya hukum **banding** tahun 2018 **meningkat** (tahun 2017 **98.56%**, tahun 2018 **99.35%**).
- Realisasi kinerja persentase perkara **perdata** yang tidak mengajukan upaya hukum **kasasi** tahun 2018 **meningkat** (tahun 2017 **100%**, tahun 2018 **95.74%**). Capaian kinerja persentase perkara **perdata** yang tidak mengajukan upaya hukum **kasasi** tahun 2018 **menurun** (tahun 2017 **108.70%**, tahun 2018 **100.78%**).

- Realisasi kinerja persentase perkara **pidana** yang tidak mengajukan upaya hukum **kasasi** tahun 2018 **meningkat** (tahun 2017 **98.97%**, tahun 2018 **99.68%**). Capaian kinerja persentase perkara **pidana** yang tidak mengajukan upaya hukum **kasasi** tahun 2018 **meningkat** (tahun 2017 **98.97%**, tahun 2018 **99.68%**).
- Realisasi dan Capaian kinerja persentase perkara **perdata dan pidana** yang tidak mengajukan upaya hukum **PK** tahun 2018 dapat dikatakan **meningkat** dikarenakan persentase yang diperoleh 100%.

Perbandingan **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum** tahun 2018 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding - Perdata - Pidana Kasasi - Perdata - Pidana PK - Perdata - Pidana	96% 100% 98% 100% 100% 100%

Realisasi kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan hukum Banding** tahun 2018 baik perdata maupun pidana jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan belum tercapai (perdata **91.49%**, perdata **99.35%**).

Realisasi kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan hukum Kasasi** tahun 2018 baik perdata maupun pidana jika dibandingkan

dengan target jangka menengah dapat dikatakan belum tercapai (perdata **95.74%**, perdata **99.68%**).

Realisasi kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan hukum PK** tahun 2018 baik perdata maupun pidana jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan sudah tercapai (perdata **100%**, perdata **100%**).

- Analisa **menurun dan meningkatnya** realisasi dan capaian kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum khususnya upaya hukum banding** tahun 2018 searah dengan index kepuasan pencari keadilan atas putusan di Pengadilan Negeri Kota Agung .

e. Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	4.7%	3.13%	66.49%

Untuk rincian capaian indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

Catatan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban

- Target persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2018 adalah **4.7%**, jumlah perkara pidana anak tahun 2018 adalah **32** perkara, yang diselesaikan dengan diversi tahun 2018 adalah **1** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jml Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\% = \frac{1}{32} \times 100\% = 3.13\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{3.13\%}{4.70\%} \times 100\% = 66.49\%$$

Perbandingan persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversitahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

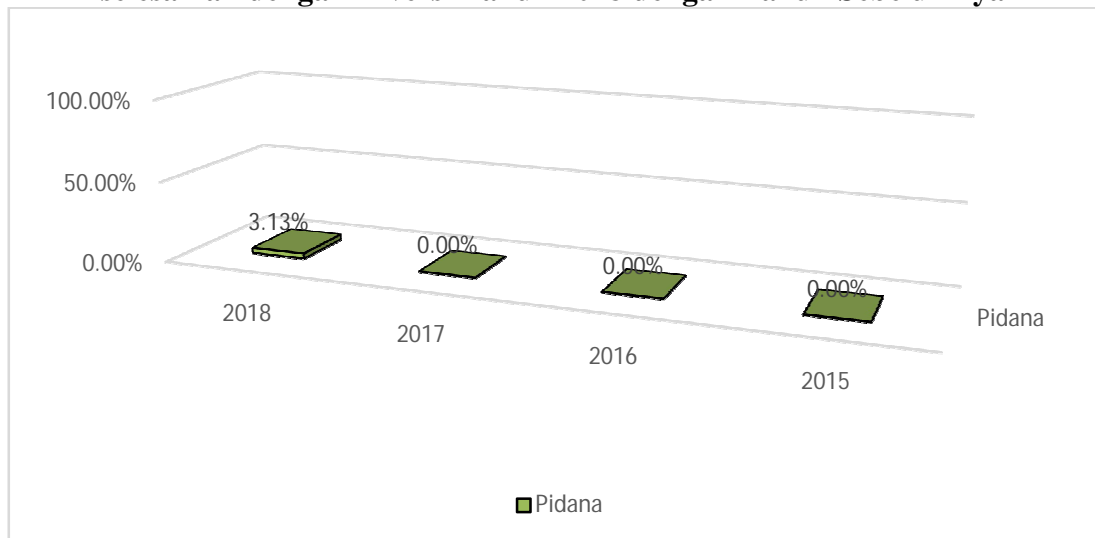
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	4.70%	3.13%	66.49%
2017	4.40%	0%	0%
2016	4.10%	0%	0%
2015	3.80%	0%	0%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara Anak	Diselesaikan Dengan Diversi
2018	32	1
2017	37	0
2016	26	0
2015	16	0

Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



- Realisasi dan capaian kinerja perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversitahun 2018 **meningkat**.

Perbandingan **persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversitahun 2018** dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%

Realisasi kinerja **persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversitahun 2018** jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan belum tercapai (3.13%).

- Analisa **meningkatnya** realisasi dan capaian kinerja **persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi** tahun 2018 dikarenakan tahun 2018 pertama kali di Pengadilan Negeri

Kota Agung adanya perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

f. Indikator Kinerja Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	92.63%	102.92%

Untuk rincian capaian indikator kinerja Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- Target index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2018 adalah **90%**, Index kepuasan pencari keadilan dilakukan dengan cara memberikan kuisioner kepada masyarakat pencari keadilan. Index kepuasan pencari keadilan diperoleh:

Realisasi: 92.63%

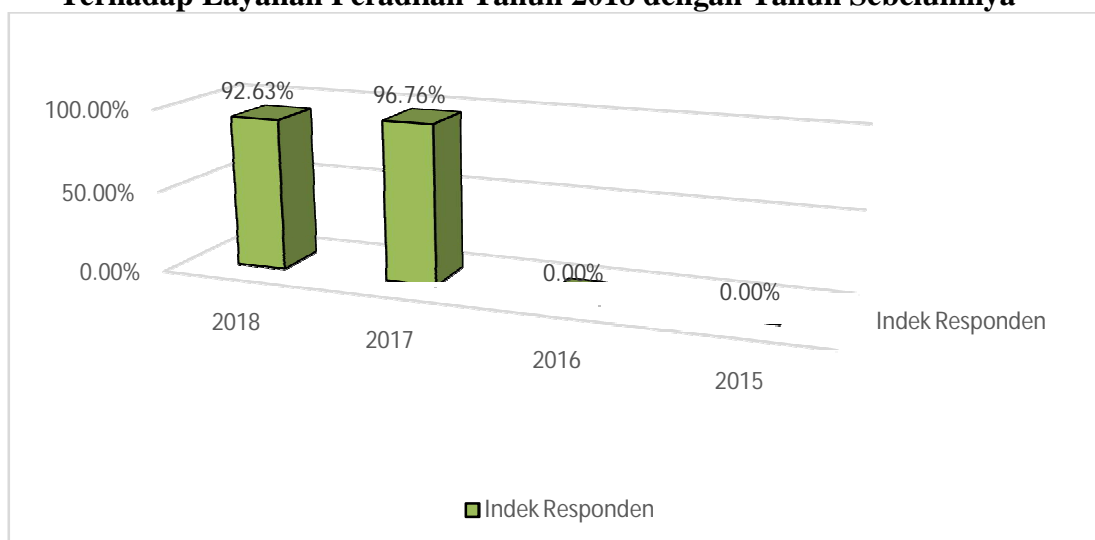
Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{92.63\%}{90\%} \times 100\% = 102.92\%$

Perbandingan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	90.00%	92.63%	102.92%
2017	85.00%	82.25%	96.76%
2016	-	-	-
2015	-	-	-

Grafik Perbandingan Realisasi Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



- Realisasi dan capaian kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2018 meningkat.

Perbandingan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilantahun 2018 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%

Realisasi kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2018 jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan belum tercapai (92.63%).

- Analisa **meningkatnya** realisasi dan capaian kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2018 dikarenakan tahun 2018 tingkat pelayanan baik sarana maupun pelayanan di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Agung terus ditingkatkan dan mendapat respon positif dari para Pencari Keadilan.

Sasaran Strategis 2:

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ini diukur berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja utama yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	14%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Pengadilan Tidak ada Perkara Tipikor

Analisis keempat indikator kinerja sasaran strategis kedua ini sebagai berikut:

a. **Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu;**

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100.00%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang Diterima tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

- Target Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu tahun 2018 adalah **100%**, jumlah tahun 2018 adalah **355** perkara terdiri dari **47** perkara perdata dan **308** perkara pidana. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang Diterima tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\% = \frac{355}{355} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

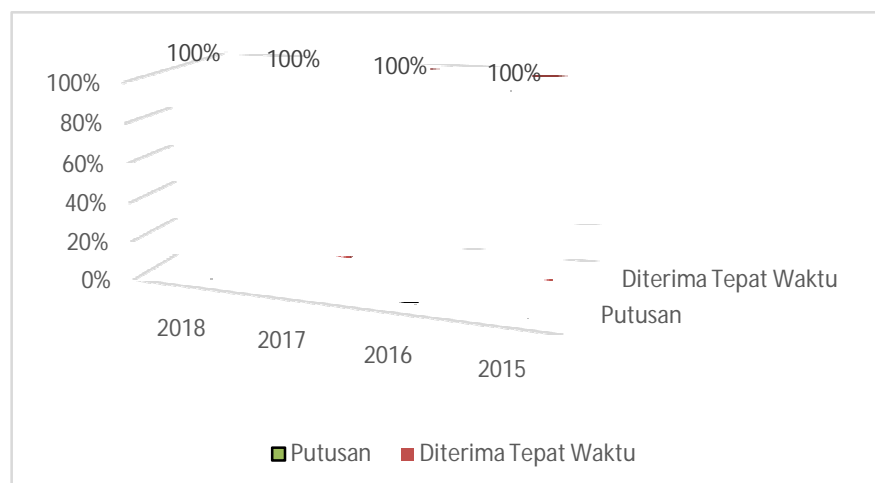
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	100%	100%	100%
2017	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%
2015	100%	100%	100%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Putusan	Diterima Tepat Waktu
2018	355	355
2017	535	535
2016	303	303
2015	320	320

Grafik Perbandingan Capaian Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi kinerja dan capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya dapat dikatakan meningkat hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi dan capaian baik tahun 2018 maupun tahun sebelumnya adalah 100% yang merupakan persentase tertinggi dari realisasi dan capaian.

Perbandingan persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktutahun 2018 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%

Realisasi kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktutahun 2018 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sama yaitu 100%, ini berarti target jangka menengah pada tahun 2018 sudah tercapai.

- Analisa keberhasilan realisasi dan capaian kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktutahun 2018 dikarenakan tingkat kedisiplinan dalam penyampaian isi putusan ke pada para pihak di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Agung sudah sangat baik.

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	14%	8.33%	59.52%

Untuk rincian capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Catatan :

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- Target persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2018 adalah **14%**, jumlah perkara tahun 2018 yang dilakukan mediasi adalah **12** perkara, yang diselesaikan dengan mediasi tahun 2018 adalah **1** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jml Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jml Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\% = \frac{1}{12} \times 100\% = 8.33\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{8.33\%}{14.00\%} \times 100\% = 59.52\%$$

Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

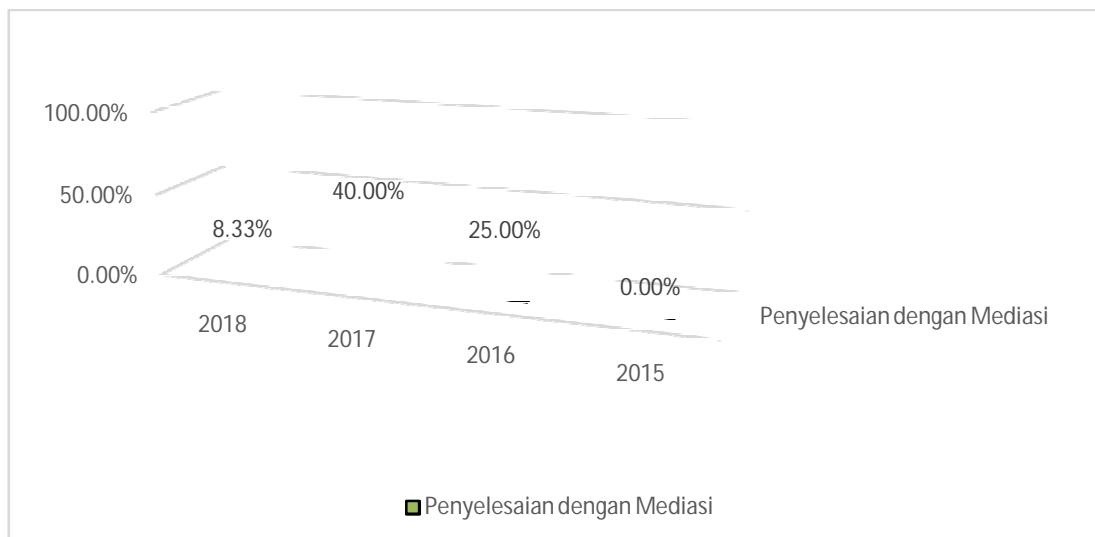
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	14%	8.33%	59.52%
2017	13%	40%	307.69%
2016	12%	25%	208.33%
2015	11%	0%	0%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara yang Mediasi	Diselesaikan Dengan Mediasi
2018	12	1
2017	30	12
2016	4	1
2015	0	0

Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



- Realisasi dan capaian kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi tahun 2018 menurun.

Perbandingan **persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** tahun 2018 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15%

Realisasi kinerja **persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** tahun 2018 jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dikatakan belum tercapai (15%).

- Analisa **menurunnya** realisasi dan capaian kinerja **persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** tahun 2018 dikarenakan tahun 2018 para pihak dalam mediasi sebagian besar tidak diperoleh kesepakatan.
- c. Indikator Kinerja Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu;**

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100.00%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

- Target persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018 adalah **100%**, jumlah tahun 2018 adalah **355** perkara terdiri dari **47** perkara perdata dan **308** perkara pidana. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

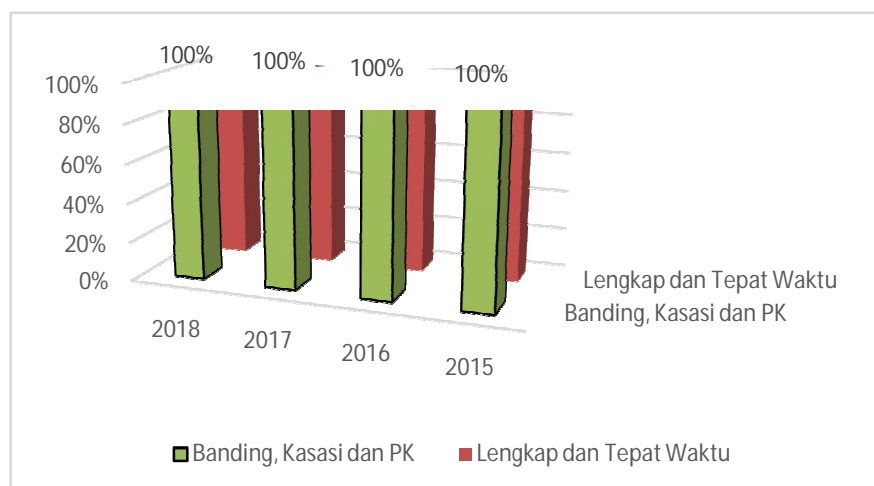
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	100%	100%	100%
2017	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%
2015	100%	100%	100%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara Banding, Kasasi dan PK	Lengkap dan Tepat Waktu
2018	9	9
2017	17	17
2016	25	25
2015	20	20

Grafik Perbandingan Capaian Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi kinerja dan capaian persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dikatakan meningkat hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi dan capaian baik tahun 2018 maupun tahun sebelumnya adalah 100% yang merupakan persentase tertinggi dari realisasi dan capaian.

Perbandingan persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Capaian Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%

Realisasi kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sama yaitu 100%, ini berarti target jangka menengah pada tahun 2018 sudah tercapai.

- Analisa keberhasilan realisasi dan capaian kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018 dikarenakan adanya control dari pihak terkait baik itu panitera, ketua pengadilan dan pihak Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	-	-

Untuk Rincian capaian indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputustahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Tipikor yang, di Upload dalam Website}}{\text{Jumlah Perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$$

Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ini diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100.00%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100.00%	100%

	Terpinggirkan	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100.00%	100%
--	---------------	---	------	---------	------

Analisis ketiga indikator kinerja sasaran strategis ketiga ini sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100.00%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

- Target persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2018 adalah **100%**, jumlah prodeo tahun 2018 adalah **0** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

$$\text{Realisasi: } \frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

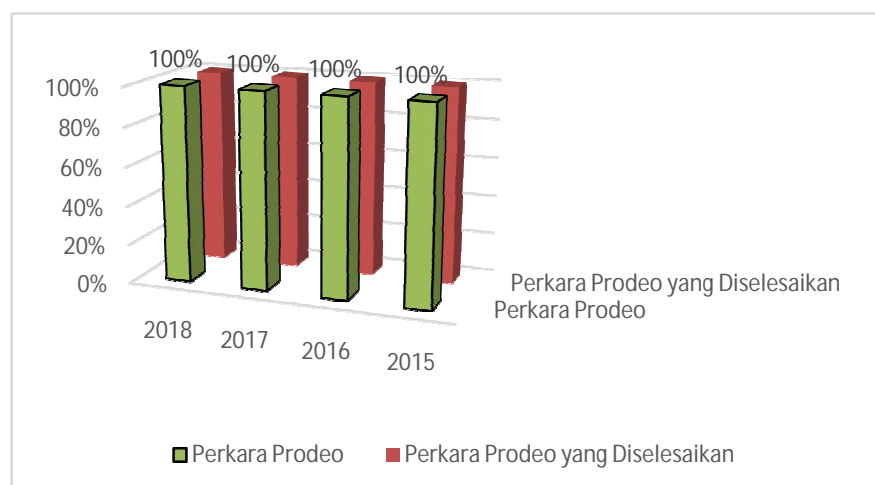
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	100%	100%	100%
2017	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%
2015	100%	100%	100%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Perkara Prodeo	Diselesaikan
2018	8	8
2017	6	6
2016	6	6
2015	6	6

Grafik Perbandingan Capaian Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi kinerja dan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dikatakan meningkat hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi dan capaian baik tahun 2018 maupun tahun sebelumnya adalah 100% yang merupakan persentase tertinggi dari realisasi dan capaian.

Perbandingan persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2018 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%

Realisasi kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2018 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sama yaitu 100%, ini berarti target jangka menengah pada tahun 2018 sudah tercapai.

- Analisa keberhasilan realisasi dan capaian kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2018 dikarenakan serapan anggaran prodeo yang ada sudah terlaksana seluruhnya.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100.00%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Catatan :

- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaats*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Negeri Kota Agung dikarenakan tidak ada anggaran untuk sidang di luar gedung pengadilan.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum);

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100.00%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

**Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukumx 100%
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu**

Catatan :

- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

- Pagu anggaran Posbakum tahun 2018 Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Anggaran tersebut berupa Honor 1 orang Advokat Piket dengan total 240 jam layanan (Rp. 100.000/jam).
- Pada tahun 2017 Pos Bakum Pengadilan Negeri Kota Agung menerima kunjungan masyarakat dan semua terlayani oleh petugas posbakum.
- Target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2018 adalah **100%**, jumlah layanan tahun 2018 adalah **10** orang. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu
Realisasi: $\frac{\text{yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\% = \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$

Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$

Perbandingan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

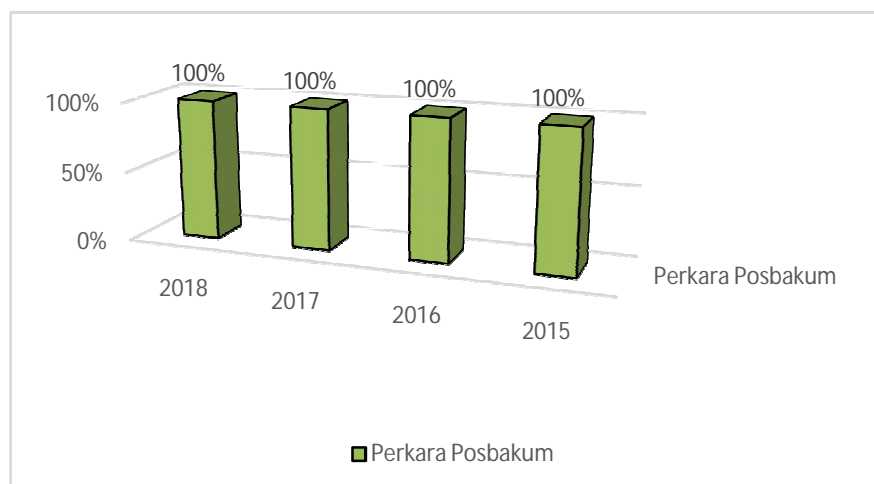
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	100%	100%	100%
2017	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%
2015	100%	100%	100%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Jml Pencari Keadilan Tertentu	Terlayani Posbakum
2018	8	8
2017	6	6
2016	6	6
2015	6	6

Grafik Perbandingan CapaianCapaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi kinerja dan capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2018

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dikatakan meningkat hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi dan capaian baik tahun 2018 maupun tahun sebelumnya adalah 100% yang merupakan persentase tertinggi dari realisasi dan capaian.

Perbandingan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2018 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

Realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2018 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sama yaitu 100%, ini berarti target jangka menengah pada tahun 2018 sudah tercapai.

- Analisa keberhasilan realisasi dan capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2018 dikarenakan serapan anggaran Posbakum yang ada sudah terlaksana seluruhnya.

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ini diukur berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018 yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Analisis keenam indikator kinerja sasaran strategis keempat ini sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi);

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

Catatan :

BHT: Berkekuatan Hukum Tetap

- Target Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018 adalah **100%**, jumlah yang mengajukan eksekusi **3** perkara permohonan tahun 2017 yang belum dijalankan eksekusinya 1 perkara, jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan **1** perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

Realisasi: $\frac{\text{Jml Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\% = \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$

Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{25\%}{100\%} \times 100\% = 25\%$

Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

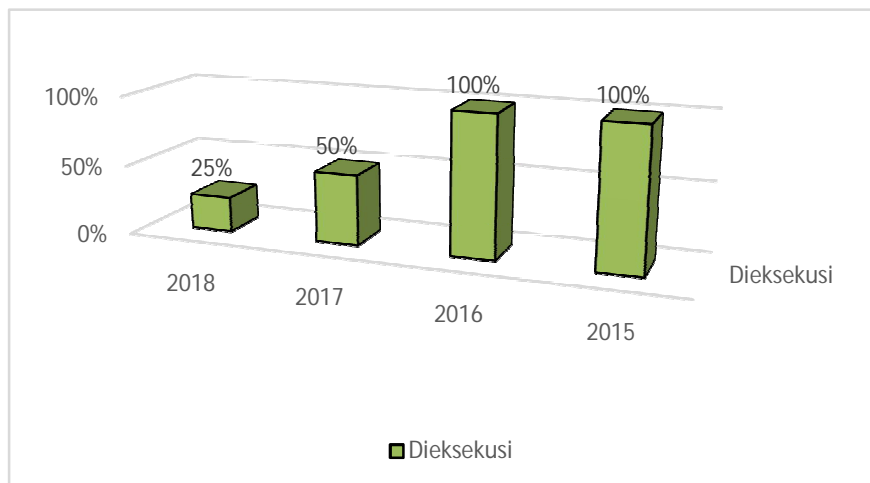
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	100%	25%	25%
2017	100%	50%	50%
2016	100%	100%	100%
2015	100%	100%	100%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Permohonan Tahun Lalu Yang Belum Dieksekusi	Yang Mengajukan Eksekusi	Dieksekusi
2018	1	3	1
2017	0	2	1
2016	0	3	3
2015	0	0	0

Grafik Perbandingan Capaian Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya



Realisasi kinerja dan capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dikatakan **menurun** hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi dan capaian tahun 2018 **25%** dan tahun 2017 adalah **50%**.

Perbandingan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Jangka Menengah (2015-2019)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah
	Uraian	Indikator kinerja	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Realisasi kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018 (25%) jika dibandingkan dengan target jangka (100%) menengah belum tercapai.

- Analisa belum tercapainya realisasi dan capaian kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018 dikarenakan 1 perkara yang megajukan eksekusi menunggu kordinasi dari pengelola barang milik Negara (BMN), 2 perkara lainnya menunggu koordinasi dari pihak pengamanan eksekusi.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
 - a. Penyelesaian Perkara Prodeo

Alokasi anggaran perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (Prodeo) pada Pengadilan Negeri Kota Agung sebesar Rp. **1.500.000,-** realisasi anggarannya sebesar **Rp. 0,- (0%)**, hal ini disebabkan pengajuan perkara prodeo di biyai oleh anggaran Kemenkumham (Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia).
 - b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018 tidak memperoleh anggaran siding di luar gedung pengadilan.

c. Posbakum

Alokasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri Kota Agung sebesar Rp. **24.000.000,-** realisasi anggarannya sebesar **24.000.000,-** (**100%**)

2. Realisasi Anggaran per Program dan per Jenis Belanja Tahun 2018

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 3.816.873.535,-** dari pagu anggaran **Rp. 3.905.906.000,-** (**97.72%**) dengan perincian sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018 per program:

Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2018 Per Program

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.402.220.000	3.327.705.707	97.81	74.514.293	2.19
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	375.400.000	374.741.920	99.82	658.080	0.18
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	128.286.000	114.425.908	89.20	13.860.092	10.80
Jumlah		3.905.906.000	3.816.873.535	97.72	89.032.465	2.28

Adapun rincian realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2018 per program sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Kota
Agung Tahun 2018 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.402.220.000	3.327.705.707	97.81	74.514.293	2.19
	Belanja Barang Non- Operasional	51.700.000	51.600.406	99.81	99.594	0.19
	Belanja Pegawai	2.612.502.000	2.565.459.727	98.20	47.042.273	1.80
	Belanja Barang Operasional	738.018.000	710.645.574	96.29	27.372.426	3.71
Jumlah		3.402.220.000	3.327.705.707	97.81	74.514.293	2.19

Realisasi penyerapan Anggaran DIPA (01) untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebagai berikut:

a) Belanja Barang Non Operasional:

- Pagu Anggaran : Rp. 51.700.000,-
- Realisasi : Rp. 51.600.406,-
- Capaian : **99.81%**

**Tabel Rincian Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (01) Pengadilan
Negeri Kota Agung Tahun 2018
Belanja Barang Non-Operasional**

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
1	524111	Beban Perjalanan Biasa	51.700.000	51.600.406	99.81	99.594	0.19
Jumlah			3.402.220.000	3.327.705.707	97.81	74.514.293	2.19

b) Belanja Pegawai:

- Pagu Anggaran : Rp. 2.612.502.000,-
- Realisasi : Rp. 2.565.459.727,-
- Capaian : **98.20%**

**Tabel Rincian Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (01) Pengadilan
Negeri Kota Agung Tahun 2018
Belanja Pegawai**

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
1	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.170.612.000	1.170.415.380	99.98	196.620	0.02
2	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	22.000	20.174	91.70	1.826	8.30
3	511121	Beban Tunj./ Suami/Istri PNS	89.087.000	89.086.382	100	618	0.00
4	511122	Beban Tunj. Anak PNS	27.250.000	27.110.924	99.49	139.076	0.51
5	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	100	0	0.00
6	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	859.080.000	859.080.000	100	0	0.00
7	511125	Beban Tunj. PPh PNS	82.529.000	82.525.687	100	3.313	0.00
8	511126	Beban Tunj. Beras PNS	67.279.000	67.278.180	100	820	0.00
9	511129	Beban Tunj. Makan PNS	271.568.000	224.868.000	82.80	46.700.000	17.20
10	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	16.935.000	16.935.000	100	0	0.00
Jumlah			2.612.502.000	2.565.459.727	98.20	47.042.273	1.80

- Berdasarkan uraian di atas penyerapan anggaran tahun 2018 untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. **2.612.502.000 (98.20%)** artinya penyerapan anggaran meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 97.90%.
- Faktor utama yang mempengaruhi penyerapan anggaran Belanja Pegawai tahun 2018 adalah mutasi pegawai dan promosi di lingkungan pengadilan Negeri Kota Agung, berikut ini data mutasi pegawai di pengadilan Negeri Kota Agung:

**Tabel Mutasi Keluar Pegawai Pengadilan Negeri Kota Agung
Tahun 2018**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	Yunizar Kilat Daya, SH., MH	Ketua	Ketua PN. Menggala	1 Februari
2	Mahendra P.K.P, SH., MH	Hakim	Hakim PN. Karang Anyar	1 Februari
3	Joni, SH	Panmud Pidana	Panmud Pidana PN. Gedong Tataan	28 September
4	Edi Yanto	Juru Sita	Juru Sita PN. Gedong Tataan	28 September
5	Edi BambangRudiyanto	Kasubbag Ortala	Kasubbag Umum dan Keuangan PN. Gunung Sugih	Maret
6	Anggun Arief Nur, SH	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti PN. Tanjung Karang	12 Juli

**Tabel Mutasi Masuk Pegawai Pengadilan Negeri Kota Agung
Tahun 2018**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum	Wakil Ketua PN. Marabahan	Ketua	28 September
2	Maurits MArganda R. Sitohang, S.H	-	Cakim	20 Februari
3	Bicterzon Welfare Hutapea, S.H	-	Cakim	20 Februari
4	Trisno Jhohannes Simanullang, S.H	-	Cakim	20 Februari
5	Murdian, S.H	-	Cakim	20 Februari

**Tabel Promosi Pegawai Pengadilan Negeri Kota Agung
Tahun 2018**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	Adrian Muharom, A.Md	Juru Sita	Kasubbag Ortala	26 Juli

c) Belanja Barang Operasional:

- Pagu Anggaran : Rp. 738.018.000,-
- Realisasi : Rp. 27.372.426,-
- Capaian : **96.29%**

**Tabel Rincian Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (01) Pengadilan
Negeri Kota Agung Tahun 2018
Belanja Barang Operasional**

N o	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
1	521111	Beban Keperluan Perkantoran	264.600.000	264.600.000	100	0	0.00
2	521811	Beban Persediaan Barang Konsumsi	39.881.000	39.880.920	100	80.00	0.00
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	30.500.000	18.907.767	61.99	11.592.233	0.00
4	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.800.000	4.778.820	99.56	21.180	0.44
5	522111	Beban Langganan Listrik	62.100.000	59.357.398	95.58	2.742.602	4.42
6	522112	Beban Langganan Telepon	7.500.000	1.108.835	14.78	6.391.165	85.22
7	522113	Beban Langganan Air	36.000.000	29.376.400	81.60	6.623.600	18.40
8	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	97.140.000	97.140.000	100	0	0.00
9	529119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9.600.000	9.599.000	99.99	1.000	0.01
10	523121	Beban Pemeliharaan	117.828.000	117.827.434	100	566	0.00

		Peralatan dan Mesin					
11	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51.720.000	51.720.000	100	0	0.00
12	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	16.349.000	16.349.000	100	0	0.00
Jumlah			738.018.000	2710.645.574	96.29	27.372.426	3.71

- Berdasarkan uraian diatas penyerapan anggaran tahun 2018 untuk Belanja Barang Operasional sebesar Rp. **738.018.000 (96.29%)** artinya penyerapan anggaran meningkat dari tahun 2017 (97.49%) dikarenakan belanja jasa berupa langganan listrik, telepon, internet dan PDAM tidak dapat terserap dengan maksimal.

Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2018 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	375.400.000	374.741.920	99.82	658.080	0.18
	BELANJA MODAL	375.400.000	374.741.920	99.82	658.080	0.18
	Jaringan Instalasi	150.000.000	150.000.000	100	0	0
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	186.400.000	186.340.000	99.97	60.000	0.03
	Sarana Prasarana Pendukung SIPP	39.000.000	38.401.620	98.47	598.080	1.53
Jumlah		375.400.000	374.741.920	99.82	658.080	0.18

**Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung
Tahun 2018 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	128.286.000	114.425.908	89.20	13.860.092	10.80
	Belanja Barang Non-Operasional	128.286.000	114.425.908	89.20	13.860.092	10.80
Jumlah		128.286.000	114.425.908	89.20	13.860.092	10.80

Realisasi penyerapan Anggaran DIPA (03) untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut:

a) Belanja Barang Non Operasional:

- Pagu Anggaran : Rp. 128.286.000,-
- Realisasi : Rp. 13.860.092,-
- Capaian : **89.20%**

**Tabel Rincian Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA (03) Pengadilan
Negeri Kota Agung Tahun 2018
Belanja Barang Non-Operasional**

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
		Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum					
1	522131	Beban Jasa Konsultan	24.000.000	24.000.000	100	0	0.00
		Pendaftaran Berkas Perkara					
2	521211	Beban Bahan	5.920.000	5.920.000	100	0	0.00
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22.200.000	22.200.000	100	0	0.00
		Pemeriksaan di sidang Pengadilan					
4	521211	Beban Bahan	42.660.000	42.660.000	100	0	0.00
5	524113	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.050.000	0	0.00	1.050.000	100
		Minutasi					

6	521211	Beban Bahan	15.096.000	15.095.908	100	92.00	0.00
Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa							
7	524113	Beban Perjalanan Dinas	5.250.000	1.260.000	24	3.990.000	76.00
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan							
8	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000	2.100.000	40	3.150.000	60.00
Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama							
9	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.500.000	0	0.00	1.500.000	100
10	524113	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	1.960.000	770.000	39.29	1.190.000	60.71
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama							
11	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500.000	0	0.00	500.000	100
12	524113	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	1.400.000	420.000	30	980.000	70.00
Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara							
13	521211	Beban Bahan	140.000	0	0.00	140.000	100
14	521811	Beban Persediaan barang konsumsi	160.000	0	0.00	160.000	100
15	522151	Beban Perjalanan Biasa	1.200.000	0	0.00	1.200.000	100
Jumlah			128.286.000	114.425.908	89.20	13.860.092	10.80

- Berdasarkan uraian diatas penyerapan Anggaran DIPA (03) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tahun 2018 untuk Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp. **128.286.000 (89.20%)** artinya penyerapan anggaran menurun dari tahun 2017 (97.32%).
- Faktor penyebab menurunnya realisasi anggaran adalah terdapat biaya pembebasan perkara yang dibiayai oleh Kemenkumham.

b. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018 per jenis belanja:

**Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung
Tahun 2018 Per Program**

No	Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	2.612.502.000	2.565.459.727	98.20	47.042.273	1.80
2	BelanjaBarang	918.004.000	876.671.888	95.50	41.332.112	4.50
3	BelanjaModal	375.400.000	374.741.920	99.82	658.080	0.18
Jumlah		3.905.906.000	3.816.873.535	97.72	89.032.465	2.28

c. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018 per Sumber Anggaran:

**Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung
Tahun 2018 Per Sumber Anggaran**

No	Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	SISA Anggaran (Rp)	%
1	Dipa Badan Urusan Administrasi (01)	2.612.502.000	2.565.459.727	98.20	47.042.273	1.80
2	Dipa Badan Peradilan Umum (03)	918.004.000	876.671.888	95.50	41.332.112	4.50
Jumlah		3.905.906.000	3.816.873.535	97.72	89.032.465	2.28

A. KESIMPULAN

1. Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dalam institusi pemerintahan, pelaksanaan kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
2. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung yang merupakan wujud transparansi dan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kota Agung dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.
3. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2018, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan, dikarenakan indikator kinerja (*outcome*) belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja (*outcome*) untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.
4. Pada LKjIP Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018 ini menyampaikan terjadinya reviu Indikator Kinerja Utama yang disinergikan dengan reviu Renstra Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2015-2019, salah satu upaya melaksanakan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atas evaluasi LKjIP tahun 2011 dan 2012. Tahun 2018 sebagai tahun keempat Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2015-2019 melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2018 serta dibandingkan dengan

rencana kinerja (*Performance Plan*) beberapa tahun sebelumnya dari *core bussines* (ciri khas) badan peradilan dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Kota Agung.

5. Unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Kota Agung oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai *user*) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanyaintervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud *good governance*.
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari lembaga tinggi Pengadilan Negeri Kota Agung, karena Rencana Kinerja Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.
7. Pengadilan Negeri Kota Agung mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen teknis, administrasi organisasi dan finansial di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan dari berbagai pihak, antara lain: masyarakat pencari keadilan yang mengharapkan adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung.
8. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas

kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Institusi Pengadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.

9. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.
10. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Pengadilan Negeri Kota Agung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di masa yang akan datang.

B. SARAN

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Kota Agung. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang:

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing bagian.

3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah untuk menghindari jika terjadi analisis pengukuran kinerja yang ada capaian kinerja yang melebihi 100%.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai *punish and reward instrument* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
6. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
7. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Negeri Kota Agung mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LKjIP, antara lain :
 - a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
 - b. mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
8. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019.
9. Capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2018 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung di masa mendatang.
10. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

11. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.